

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aset Tetap

2.1.1 Pengertian Aset Tetap

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya setiap perusahaan dengan jenis usaha apapun harus memiliki kekayaan untuk menunjang kegiatan tersebut. Bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan salah satunya adalah aset tetap berwujud. Aset tetap merupakan salah satu komponen dalam laporan posisi keuangan yang memiliki unsur penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan, karena setiap aktivitas perusahaan tidak terlepas dari penggunaan aset tetap.

Ada begitu banyak pengertian aset tetap menurut para ahli. Berikut ini akan penulis uraikan beberapa definisi aset tetap yang dikemukakan para ahli:

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2022:16.2), aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
2. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Kieso, dkk (2018:631), pengertian aset tetap ialah “aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk tujuan administratif; aset-aset tersebut diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode”.

Menurut Warren, dkk (2017:493), aset tetap (*fixed asset*) adalah “aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah”. Sedangkan menurut Hery (2016:148), aset tetap adalah “aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat dikatakan bahwa aset tetap merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual serta diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan selama bertahun-tahun.

2.1.2 Kriteria Aset Tetap

Pada umumnya, perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki aset tetap yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Aset tetap dapat berupa kendaraan, inventaris kantor, bangunan, mesin dan peralatan. Namun, aset-aset tersebut tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap jika tidak memenuhi beberapa kriteria aset tetap. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai kriteria dari aset tetap:

Menurut Warren, dkk (2017:486), suatu aset tergolong sebagai aset tetap jika memiliki tiga kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset berwujud.
2. Dimiliki dan digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi.

Menurut Kieso, dkk (2018:631), kriteria utama dari aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai aset tetap.
2. Aset-aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Aset tetap memberikan manfaat selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini untuk beberapa periode mendatang melalui biaya penyusutan periodik.
3. Aset-aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap adalah aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan fisik atau substansi.

Sementara itu Martani, dkk (2019:271) menyatakan ada beberapa hal penting terkait aset tetap yaitu:

1. Aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merk dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud).
2. Aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset seperti tanah

yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual, bukan merupakan aset tetap.

3. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria aset tetap memiliki beberapa karakteristik diantaranya mempunyai wujud fisik, tidak diajukan untuk dijual kembali, memiliki nilai yang material dan cukup signifikan, memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, serta aset dapat digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.

2.1.3 Klasifikasi Aset Tetap

Suatu perusahaan yang sejenis dan mempunyai skala yang sama, tetapi belum tentu memiliki aset tetap yang sama. Secara umum, aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan adalah tanah, bangunan, kendaraan, mesin dan sebagainya. Aset tetap berwujud umumnya memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi dan diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya.

Menurut Baridwan (2015:272), aset tetap untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut:

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan dan lain-lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

Berdasarkan teori di atas, aset tetap diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yaitu aset tetap yang umurnya terbatas, aset tetap yang umurnya tidak terbatas, dan aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis.

2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Setiap entitas bisnis diharapkan dapat melakukan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan tujuan untuk memudahkan dalam membuat ataupun membaca laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan.

Adapun pengertian Standar Akuntansi Keuangan menurut Bahri (2016:6) adalah “sekumpulan standar umum atau disebut *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) yang mengatur bagaimana peristiwa ekonomi dilaporkan”. Sementara Kartikahadi, dkk (2016:59) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan merupakan “sumber acuan utama dalam menyusun laporan keuangan agar lebih berguna, dapat dimengerti, dan dapat dibandingkan serta tidak menyesatkan.

Selain itu, menurut Yadiati (2017:29) Standar Akuntansi Keuangan adalah: Standar yang mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*standard setting body*) pada saat tertentu. Standar ini juga merupakan konsensus atau kesepakatan bersama tentang pengukuran pengakuan penilaian, pengungkapan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya ke dalam bentuk laporan keuangan.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa standar akuntansi keuangan merupakan acuan atau aturan yang mengatur setiap entitas bisnis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Menurut Martani, dkk (2019:25), standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi 5 jenis yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha, kelima standar tersebut adalah:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum Berbasis IFRS Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun).
2. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
SAK ETAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun yang termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, antara lain:
 - a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan;

- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.
- 3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)
Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, salam, ijarah, dan istishna.
- 4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi atau peraturan yang mengatur dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.
- 5. SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)
Berdasarkan SAK EMKM adalah standar akuntansi yang digunakan untuk entitas mikro kecil dan menengah dalam penyusunan laporan keuangan. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi dan kriteria sebagai usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Martani, dkk (2019:29), pada dasarnya standar akuntansi yang ada baik itu SAK, SAK ETAP, SAK Syariah, SAP maupun SAK EMKM mempunyai kegunaan yang sama yaitu untuk membantu pengguna laporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta memudahkan dalam menginterpretasikan laporan keuangan, yang berbeda hanya entitas yang menggunakannya yaitu SAK untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, SAK EMKM untuk UMKM, SAK Syariah untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah dan SAP untuk pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia terdiri dari 5 jenis yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

2.1.5 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP) merupakan standar Akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang biasa dilakukan oleh UKM dimana bentuk pengaturan lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dan relatif tidak berubah selama bertahun-tahun. SAK ETAP diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Menurut SAK ETAP (2020:1.1) entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP (2020:1.2) menyatakan bahwa entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
2. Entitas menguasai aset dalam kapastias sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi

Menurut SAK ETAP (2020:1.2) “entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan menggunakan SAK ETAP”.

Jika pada standar akuntansi yang lain menggunakan istilah pernyataan standar maka pada SAK ETAP ini tidak digunakan pernyataan standar melainkan Bab. SAK ETAP tahun 2020 terdiri atas 30 Bab. SAK ETAP merupakan pilar kedua

standar akuntansi keuangan di Indonesia setelah SAK umum berbasis IFRS. SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, termasuk UMKM.

2.2 Perlakuan Akuntansi Menurut SAK ETAP Bab 15 Tentang Aset Tetap

2.2.1 Komponen-Komponen Perlakuan Akuntansi Menurut SAK ETAP Bab 15 Tentang Aset Tetap

Perlakuan akuntansi aset tetap ialah aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi terkait dengan aset tetap yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan aset tetap yang dikenal dengan proses perolehan aset tetap, dimulai sejak pembelian (didirikan) aset, pengangkutan aset, pemasangan aset sampai aset itu siap untuk dipakai dalam proses produksi atau kegiatan perusahaan. Pada saat proses perolehan aset tetap tersebut dikeluarkan sejumlah dana yaitu harga pembelian aset itu ditambah biaya-biaya lain seperti biaya pengangkutan, biaya pemasangan, bea masuk dan biaya lain-lain yang akan dicatat sebagai harga perolehan aset tetap itu sendiri.

Menurut SAK ETAP (2020:15.4-15.32) perlakuan akuntansi atas aset tetap meliputi:

1. Pengakuan
2. Pengukuran saat pengakuan
3. Pengukuran setelah pengakuan
4. Penyusutan
5. Penurunan nilai
6. Penghentian pengakuan
7. Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi menurut SAK ETAP terdiri dari beberapa langkah-langkah yaitu pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penyusutan, penurunan nilai, penghentian pengakuan dan pengungkapan.

2.2.2 Pengakuan

Pengakuan aset tetap sebagaimana untuk aset lainnya, dalam SAK ETAP (2020:15.4) menyatakan bahwa entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika:

1. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Menurut Baridwan (2015:278), cara-cara perolehan aset tetap, yaitu sebagai berikut:

1. Pembelian tunai

Aset tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap untuk dipakai. Pembelian secara lumsom atau gabungan dimana apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aset tetap berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aset yang bersangkutan.
2. Perolehan melalui pertukaran
 - a. Ditukar dengan Surat-surat Berharga Aset tetap yang di peroleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Pertukaran aset tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi perusahaan sebesar nilai nominalnya, selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio/disagio.
 - b. Ditukar dengan Aset Tetap yang Lain Perolehan aset tetap dengan cara ditukar dengan aset tetap yang lain dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pertukaran Aset Tetap yang Tidak Sejenis dan
 - 2) Pertukaran Aset Tetap Sejenis
3. Pembelian angsuran

Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan sendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga.
4. Diperoleh dari hadiah/donasi

Aset tetap yang diperoleh dari hadiah/ donasi, pencatatanya dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Apabila aset dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah

aset dan modal terlalu kecil, juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini maka aset yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya.

5. Aset yang dibuat sendiri

Perusahaan mungkin membuat sendiri aset tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat dan perabot. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau pegawai yang masih idle. Dalam pembuatan aset, semua biaya yang dapat dibebankan langsung seperti bahan, upah langsung dan factory overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aset yang dibuat. Apabila pembuatan aset itu menggunakan dana yang berasal dari pinjaman, maka bunga pinjaman selama masa pembuatan aset dikapitalisasi dalam harga perolehan aset. Sesudah aset itu selesai dibuat, biaya bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya.

Berdasarkan pendapat Baridwan di atas dapat dikatakan bahwa cara cara perolehan aset tetap terdiri dari: pembelian tunai, aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran, pembelian angsuran, diperoleh melalui hadiah/donasi, dan aset yang dibuat sendiri.

2.2.3 Pengukuran Pada Saat Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan.

Menurut SAK ETAP (2020:15.7) biaya perolehan aset tetap meliputi:

1. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

2.2.4 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal perusahaan harus mengukur aset pada biaya perolehan, menurut SAK ETAP (2020:15.14-15.16) menyatakan:

1. Entitas harus mengukur seluruh aset tetap pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Entitas harus mengakui biaya pemeliharaan dan biaya reparasi

sehari-hari (*cost of day-today servicing*) dari aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

2. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama “Surplus Revaluasi Aset Tetap”.
3. Surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi.

2.2.5 Penyusutan Aset Tetap

2.2.5.1 Pengertian Penyusutan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2020:15.17) menyatakan “beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali bab lain mensyaratkan biaya tersebut merupakan bagian biaya perolehan suatu aset. Misalnya, penyusutan aset tetap manufaktur termasuk biaya persediaan”.

Menurut Baridwan (2015:307) menyatakan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan setiap periode sebagai berikut:

1. Harga Perolehan (*Cost*)
Yaitu uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat digunakan.
2. Taksiran Nilai Sisa (*Residu*)
Nilai sisa suatu aktiva yang didepresiasi adalah jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual/ menentukannya. Cara menentukan umur ekonomis aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 Tentang: jenis-jenis harta yang

termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Tabel 2.1
Pengelompokan Umur Manfaat Aset Tetap

Kelompok 1 (Masa manfaat 4 tahun)	Kelompok 2 (Masa manfaat 8 tahun)	Kelompok 3 (Masa manfaat 16 tahun)	Kelompok 4 (Masa manfaat 20 tahun)
Mebel dan peralatan dari kayu termasuk Meja, Bangku, Kursi, Lemari	Mebel dan peralatan dari logam termasuk Meja, Kursi, Lemari	Mesin tambang	Lokomotif
Telepon, Fax, Handphone	Alat pengatur udara seperti AC, Kipas angin	Mesin textile	Bangunan
Mesin Tik, Mesin Hitung, Mesin Photocopy	Mobil, Bus, Truck, <i>Speed Boat</i>	Mesin pengolah kayu	Gerbong kereta
Komputer, Printer, Modem	Mesin jahit	Pesawat terbang	Kapal penumpang
Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan	Mesin pompa	Perahu layar	Kapal barang
Sepeda Motor, Sepeda dan Becak	Mesin perah susu	Perangkat radio navigasi	Dok terapung
Amplifier, Tape/ <i>Cassette</i> , Video Recorder, Televisi	(Kapal yang mempunyai berat dibawah 100 DWT)	(Kapal yang mempunyai berat dibawah 1,000DWT)	(Kapal yang mempunyai berat diatas 1.000DWT)

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/PMK.03/2018

3. Taksiran Umur Kegunaan (Masa Manfaat)

Taksiran umum kegunaan suatu aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat dianut dalam reparasi. Taksiran umur kegunaan ini bisa dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerjanya.

Penyusutan untuk sebagian periode adalah perhitungan beban depresiasi jika periodenya tidak selama satu periode akuntansi (tahun buku). Ketentuan-ketentuan menurut Baridwan (2015:317) yaitu:

1. Bila aset tetap dibeli sebelum tanggal 15 bulan tertentu, maka itu dihitung sepenuhnya untuk penentuan besarnya depresiasi.
2. Bila pembelian aset sesudah tanggal 15 bulan tertentu, maka bulan itu tidak diperhitungkan.
3. Penyusutan akan dihitung penuh bulanan, sehingga bila tidak untuk seluruh tahun buku perhitungan depresiasinya dihitung sejumlah bulannya dan dibagi dua belas.

Apabila aset tidak dibeli awal periode maka untuk dapat menghitung beban penyusutan tahunan dengan metode garis lurus perlu dilakukan perhitungan dengan dua langkah yaitu (Baridwan, 2015:317):

1. Menghitung depresiasi tahunan
2. Mengalokasikan depresiasi tahunan ke masing-masing periode atas dasar waktu.

2.2.5.2 Metode Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap didalam suatu perusahaan tidak dapat digunakan secara terus menerus karena akan mengalami kerusakan dan berkurangnya nilai dari aset tetap tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan penyusutan untuk setiap aset tetapnya untuk ditaksir masa manfaat dan nilai sisa dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan.

Pengertian penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah “alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama masa manfaatnya”. Menurut Warren dkk (2015:499) penyusutan atau depresiasi (depreciation) adalah “Pemindahan biaya ke beban secara berkala selama masa penggunaannya”. Menurut Martani dkk (2019:312) depresiasi adalah “metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut”.

Ada beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan perusahaan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan dari pihak manajemen. Metode yang telah digunakan tersebut harus diterapkan perusahaan secara konsisten dari periode ke periode.

Menurut Hery (2016:173) ada beberapa metode yang berbeda untuk menghitung besarnya beban penyusutan. Dalam praktek, kebanyakan perusahaan akan memilih satu metode penyusutan dan akan menggunakannya untuk seluruh aset yang dimilikinya. Beberapa metode tersebut, yaitu :

1. Berdasarkan waktu
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*)
 - b. Metode pembebanan yang menurun (dipercepat);
 - Metode jumlah angka tahun (*sum of the year's digits method*)
 - Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
2. Berdasarkan penggunaan
 - a. Metode jam jasa (*service hours method*)
 - b. Metode unit produksi (*productive output method*)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2020:15.22) dalam SAK ETAP menyatakan bahwa:

Suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih, antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*).

Menurut Martini (2019:315) tiga metode depersiasi yang umum digunakan oleh entitas yaitu:

1. Metode garis lurus (akan menghasilkan pembebanan yang konstan selama masa manfaat aset bila estimasi nilai residu aset tidak berubah dan tidak terjadi penurunan nilai aset).
2. Metode pembebanan menurun (akan menghasilkan pembebanan yang semakin menurun selama masa manfaat aset).
3. Metode unit produksi (akan menghasilkan pembebanan yang didasarkan pada ekspektasi penggunaan aset atau output yang dihasilkan).

Berikut ini akan diberikan penjelasan mengenai metode-metode penyusutan, yaitu:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode Garis Lurus adalah metode perhitungan penyusutan aset tetap di mana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata yang relatif stabil. Beban penyusutannya dihitung dengan

mengurangi harga perolehan pada saat membeli aset tetap dengan nilai sisa dan dibagi dengan umur manfaat aset tetap tersebut.

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan (HP)} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur Manfaat}}$$

2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*)

Metode Saldo Menurun ini beban penyusutan periodiknya dihitung dengan cara mengalikan tarif yang tetap dengan nilai buku aktiva. Karena nilai buku aktiva ini setiap tahun selalu menurun maka beban depresiasi tiap tahunnya juga selalu menurun.

$$\text{Tarif Penyusutan} = 100\% : \text{Umur Manfaat}$$

$$\text{Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Tahun} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

3. Metode Penyusutan Satuan Hasil Produksi (*Productive Output Method*)

Metode perhitungan penyusutan aset tetap ini di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung berdasarkan berapa banyak produk yang dihasilkan selama periode akuntansi akan diketahui beban penyusutan per unit produk. Metode ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan (HP)} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Jumlah Total Produk yang Dapat Dihasilkan}}$$

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Jumlah Satuan Produk} \times \text{Tarif Penyusutan Produk}$$

Beban penyusutan aset tetap yang dihitung dengan metode hasil produksi akan menghasilkan tarif penyusutan per unit atau per satuan tertentu. Berdasarkan tarif penyusutan itu, beban penyusutan suatu periode dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan jumlah unit atau satuan lain yang digunakan dalam periode bersangkutan.

2.2.6 Penurunan Nilai

Suatu aset tetap harus diperhatikan apakah aset tetap telah mengalami penurunan nilai dan bagaimana mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2020:21.1), “kerugian

penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh”.

2.2.6.1 Indikator Penurunan Nilai

Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa ada aset yang turun nilainya. Jika indikasi tersebut ada, entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Jika tidak terdapat indikasi penurunan nilai, tidak diperlukan untuk mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2020:22.8) dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai, entitas mempertimbangkan, setidaknya, indikasi berikut:

Sumber Informasi Eksternal

1. Selama periode tersebut, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diperkirakan sebagai hasil dari berlalunya waktu atau penggunaan normal.
2. Perubahan signifikan dengan dampak negatif pada entitas telah terjadi selama periode tersebut, atau akan terjadi dalam waktu dekat, dalam lingkungan teknologi, pasar, ekonomi atau legal di mana entitas beroperasi atau dalam pasar di mana aset tersebut diperuntukkan.
3. Tingkat suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain atas investasi telah meningkat selama periode, dan kenaikan tersebut kemungkinan akan berpengaruh secara material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset dan menurunkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset.
4. Jumlah tercatat aset neto entitas lebih dari nilai wajar estimasian entitas secara keseluruhan (estimasi tersebut mungkin telah dibuat, sebagai contoh, dalam kaitannya dengan penjualan potensial atas sebagian atau seluruh entitas).

Sumber Informasi Internal

5. Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset.
6. Perubahan signifikan dengan dampak negatif pada entitas telah terjadi selama periode tersebut, atau diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, sejauh mana, atau cara bagaimana, aset digunakan atau diperkirakan akan digunakan. Perubahan ini mencakup aset yang tidak digunakan, rencana untuk menghentikan atau merestrukturisasi operasi di mana aset tersebut berada dan rencana untuk melepaskan aset sebelum tanggal ekspektasian sebelumnya.
7. Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomik dari aset adalah (atau akan) lebih buruk dari yang

diperkirakan. Dalam konteks ini, kinerja ekonomik mencakup hasil operasi dan arus kas.

2.2.6.2 Pengukuran Nilai Wajar Dikurangi Biaya Untuk Menjual

Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan sebuah atau kelompok aset antara pihak-pihak yang paham dan berkeinginan melakukan transaksi dengan wajar dikurangi dengan biaya penghentian aset tersebut.

Menurut SAK ETAP (2020:22.11) Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar aset tunggal, maka entitas harus mengukur nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual untuk kelompok aset. Untuk tujuan ini, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual harus diestimasi untuk kelompok aset paling kecil yang dapat diidentifikasi:

1. Termasuk aset yang terindikasi penurunan nilai
2. Memiliki nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yang dapat diestimasi.

Menurut SAK ETAP (2020:22.12) Entitas harus menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berdasarkan hirarki keandalan bukti sebagai berikut:

1. Harga dalam suatu Perjanjian yang mengikat dalam transaksi antara pihak-pihak yang paham dan berkeinginan melakukan transaksi dengan wajar, disesuaikan untuk biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan pelepasan aset.
2. Jika tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat tetapi aset diperdagangkan dalam Pasar aktif, maka nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah harga pasar aset dikurangi dengan biaya pelepasan - biasanya berdasarkan harga penawaran kini (*current bid price*).
3. Jika harga-harga penawaran kini tidak tersedia, maka harga transaksi terkini dapat menjadi dasar untuk mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
4. Jika tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat atau pasar aktif untuk suatu aset, maka nilai wajar dikurangi biaya menjual didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia untuk merefleksikan jumlah yang dapat diperoleh entitas, pada akhir periode pelaporan, dari pelepasan aset pada transaksi antara pihak-pihak yang paham dan berkeinginan melakukan transaksi dengan wajar setelah dikurangi biaya Pelepasan. Dalam menentukan jumlah ini, entitas mempertimbangkan hasil dari transaksi paling kini untuk aset yang sejenis dalam industri yang sama. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual tidak merefleksikan

penjualan yang dipaksakan, kecuali manajemen dipaksa untuk menjual secepatnya.

2.2.7 Penghentian Pengakuan

Aset tetap yang digunakan oleh perusahaan pada suatu saat akan dihentikan penggunaannya ketika masa manfaatnya telah habis, baik karena kerusakan, keusangan dan ketertinggalan aset tetap tersebut dengan teknologi terbaru. Saat aset tetap dihentikan, semua rekening yang berhubungan dengan aset tetap yang bersangkutan harus dihapuskan. Seperti yang dijelaskan oleh Baridwan (2015: 291), “Pada waktu aset tetap dihentikan dari pemakain maka semua rekening yang berhubungan dengan aset tersebut dihapuskan”. Begitu juga IAI dalam SAK ETAP (2020:15.27) menjelaskan bahwa” Entitas harus menghentikan pengakuan aset tetap pada saat dilepasakan, ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan dan pelepasannya”.

Soemarso (2017: 49) menyatakan bahwa penarikan aset tetap dapat dilakukan dengan dijual, ditukarkan dengan aset lain atau dibuang begitu saja (dihapuskan).

1. Pembuangan Aset Tetap

Apabila aset tetap tidak berguna lagi bagi perusahaan serta tidak memiliki nilai jual, maka aset tersebut dapat dibuang. Jika aset tetap tersebut belum disusutkan secara penuh, maka harus terlebih dahulu dilakukan pencatatan penyusutan sebelum aset tersebut dibuang dan dihapus dari catatan akuntansi perusahaan. dalam hal ini, tidak akan timbul keuntungan ataupun kerugian yang harus diakui dalam catatan akuntansi karena aset tetap telah disusutkan secara penuh dan tidak memiliki nilai sisa (*salvage value*).

2. Penjualan Aset Tetap

Apabila suatu aset tetap sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan, tetapi masih memiliki nilai sisa, maka Aset tersebut dapat dijual. Penjualan aset tetap ini dapat menimbulkan keuntungan jika dijual di atas nilai sisanya, atau menimbulkan kerugian jika dijual di bawah nilai sisanya. Jika hasil dari penjualan aset tetap adalah dalam bentuk kas atau piutang (aset moneter), maka pencatatan transaksi tersebut harus mengikuti urutan yang telah diaturkan.

3. Pertukaran Dengan Aset Lainnya

Sering terjadi bahwa aset lama ditukar dengan aset baru dengan mempertimbangkan harga pasar Aset lama. Pertukaran ini dapat terjadi baik antara aset tetap yang sejenis ataupun aset tetap yang tidak sejenis. Nilai tukar tambah (*trade-in allowance*), dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai buku Aset Tetap lama. Saldo yang tersisa atau

jumlah yang terutang atas transaksi pertukaran ini, dapat dibayarkan tunai atau dicatat sebagai kewajiban. Pertukaran aset tetap seperti ini juga menimbulkan keuntungan atau kerugian yang perlu diakui dalam catatan akuntansi pada saat pertukaran terjadi.

4. Konversi Terpaksa

Adakalanya penghentian penggunaan aset tetap terjadi karena kerusakan berat akibat peristiwa-peristiwa seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, atau pengapkiran. Penghentian pemakaian yang disebabkan oleh jenis-jenis kejadian yang tidak dapat dikendalikan seperti ini digolongkan sebagai konversi terpaksa. Beberapa dari peristiwa ini merupakan resiko yang dapat diasuransikan, dan terjadinya peristiwa tersebut menghasilkan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Jika ganti rugi itu lebih besar daripada nilai buku aset yang rusak, maka keuntungan harus diakui pada pembukuan. Jika ganti rugi lebih kecil daripada nilai buku, kerugian akan dicatat.

5. Penghapusan Aset Tetap

Aset Tetap berwujud dihapuskan kalau aset tetap berwujud tidak dapat dijual atau ditukarkan. apabila aset tetap berwujud belum disusutkan penuh akan menghasilkan kerugian sebesar nilai buku. aset tetap berwujud juga dapat dihapuskan karena kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan bencana alam.

2.2.8 Pengungkapan

Pengungkapan aset tetap menurut SAK ETAP (2020:15.31) entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap:

1. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto
2. Metode penyusutan yang digunakan
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan kumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode dan;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan
 - b. Pelepasan
 - c. Kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam laporan laba rugi
 - d. Penyusutan
 - e. Perubahan lainnya

Selain itu menurut SAK ETAP (2020:15.32), entitas juga harus mengungkapkan:

1. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang
2. Jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap.